

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA AGUSTUS 2011

Kegiatan DPR minggu ketiga Agustus 2011, terfokus pada acara Sidang Bersama dan Sidang RAPBN 2012 pada Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2011-2012. Berikut ringkasan kegiatan DPR pada 16 Agustus 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI 16 Agustus 2011

Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI tahun 2011 ini dipimpin oleh DPD-RI sesuai giliran. Ketua DPD menyampaikan pengantar atas berlangsungnya sidang bersama, sekaligus menyampaikan penjelasan singkat mengenai makna kemerdekaan RI sekaligus evaluasi terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial yang telah dijalani oleh bangsa selama 66 tahun kemerdekaan.

Inti dari pidato kenegaraan Presiden-RI dalam rangka HUT ke-66 antara lain adalah: **pertama**, kemerdekaan tidak hanya sebuah peristiwa istimewa yang dirayakan setiap tahun, namun juga dimaksudkan untuk membuat kita semua bangsa Indonesia bersatu menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa dan negara. Kemerdekaan tidak hanya meneguhkan kemandirian, tetapi juga sebuah ajakan untuk bersama bangsa-bangsa lain, mendorong kerjasama dan kemitraan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sesungguhnya kemerdekaan adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil, makmur, unggul dan bermartabat.

Kedua, dalam 10 tahun era reformasi, bangsa Indonesia telah berhasil melewati arus sejarah yang tidak mudah, berhasil menjawab tantangan jaman dan tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan yang fundamental. Saat ini, kita telah tampil sebagai negara demokrasi yang paling stabil dan mapan



di Asia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Banyak pihak menyebut Indonesia sebagai *emerging economy*, bukan ekonomi dunia ketiga yang selama lebih 60 tahun selalu diasosiasikan dengan negara kita. Negara telah memiliki peluang yang sangat baik, menjadi salah satu negara dengan skala ekonomi 10 terbesar di dunia dalam 2 sampai 3 dasawarsa mendatang. Bahwa dalam menuju masa depan yang lebih baik, Indonesia telah mencapai prestasi dalam tahun-tahun terakhir ini dengan kepercayaan diri yang penuh, namun dengan rendah hati, dipastikan bahwa Indonesia tidak berada di bibir jurang kegagalan dan kebangkrutan. Persepsi diri tentang negara gagal, sesungguhnya telah sirna, setelah Indonesia berhasil sepenuhnya keluar dari krisis multidimensional yang berlangsung selama 1998-1999.

Pembukaan Masa Sidang I 2011-2012

Acara Pembukaan Masa Sidang I tahun sidang 2011-2012 tanggal 16 Agustus 2011 pukul 14.30, memiliki dua agenda Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan Sidang I tahun Sidang 2011-2012 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dan Nota Keuangannya beserta Dokumen Pendukung.

Pidato Ketua DPR pada agenda pertama ini antara lain menggambarkan rencana kerja DPR dalam Masa Sidang I dalam menjalankan 3 fungsi DPR, yaitu fungsi

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI**: Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **FOTOGRAFER**: Eka Hindra **PENANGGUNG JAWAB FOTO**: Rizka Arinindyia **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

si legislasi, anggaran dan pengawasan. Untuk fungsi anggaran, akan fokus pada penyelesaian RUU APBN 2012. RUU ini harus selesai pada Oktober (sebelum penutupan masa sidang) sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 4 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran, antara lain dikatakan bahwa RAPBN setiap tahun disusun atas dasar asumsi makro-ekonomi, didasarkan pada kondisi dan permasalahan nasional dan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia. APBN merupakan tanggapan pemerintah Pusat dan daerah untuk menjawab tantangan dalam rangka kesejahteraan rakyat dan mewujudkan cita-cita nasional sebagai bangsa yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Pembukaan UUD 1945. APBN ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak dasar rakyat yang tersebar di seluruh daerah. Politik anggaran menuntut rumusan konseptual pengelolaan anggaran yang jelas dan terukur, serta dapat memberikan kepastian bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

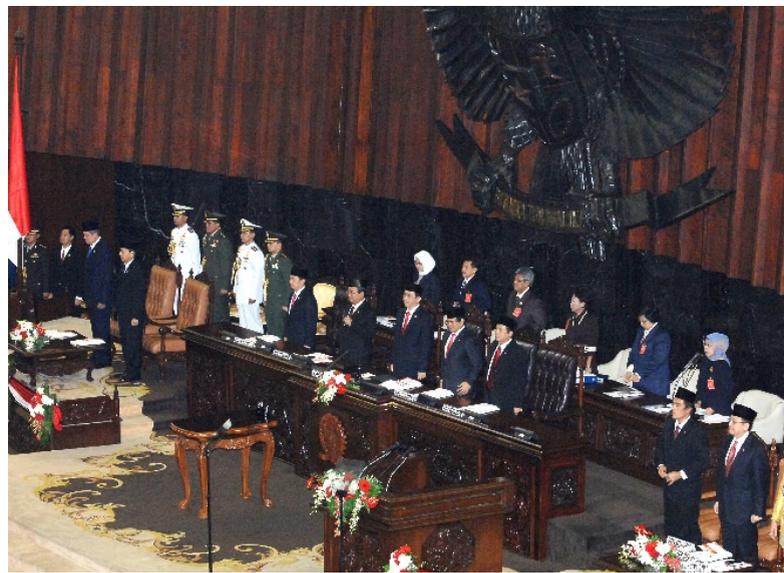
Dalam Pembicaraan Pendahuluan tersebut, Dewan telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012 sebagai pedoman dalam penyusunan APBN tahun 2012, antara lain: [1] Pertumbuhan ekonomi 6,6 - 7 persen; [2] Inflasi disepakati 4 - 5,3 persen; [3] Nilai tukar Rupiah 8.600,00 - 9.100,00 per dolar Amerika Serikat; [4] Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan 5,5 - 6,75 persen; [5] Produksi minyak bumi (*lifting*) sebesar 950.000 - 970.000 barel per hari; dan [6] Harga patokan minyak bumi Indonesia 75,0 - 95,0 dolar Amerika Serikat per barel.

Dalam pidatonya, Ketua DPR juga menyampaikan sanggungannya tentang fungsi pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah, melalui kebijakan desentralisasi sebagai konsensus politik nasional cukup banyak kemajuan, namun masih banyak persoalan yang ditemukan. Persoalan yang muncul, utamanya berkaitan dengan masalah hubungan Pusat dan Daerah, terkait dalam hal fiskal dan anggaran. Selain itu, pelaksanaan Otonomi Daerah juga masih terkendala pada penataan daerah atau penataan manajemen unit Pemerintahan Daerah. Misalnya, pemekaran daerah, wilayah perbatasan, penataan ruang wilayah, serta dalam hal tata kehidupan masyarakat.

Dalam fungsi perundang-undangan, Ketua DPR melaporkan bahwa, Dewan akan menuntaskan beberapa RUU yang sangat penting untuk diselesaikan dalam Masa Sidang I diantaranya adalah RUU BPJS, RUU tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Bantuan Hukum dan beberapa RUU lain yang siap memasuki pembicaraan tingkat II. Beberapa RUU

yang lain, seperti RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Paket RUU Bidang Politik akan diselesaikan sesuai prioritas.

Untuk RUU BPJS, Dewan meminta perhatian agar semua pihak, terutama Pemerintah, agar serius menyelesaikannya dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, khususnya pasal 28H (amandemen kedua) UUD 1945. Peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik di bidang kesejahteraan, merupakan tuntutan negara kesejahteraan dalam memberikan perlindungan kepada segenap bangsanya. Dasar Negara Pancasila, telah mengamanatkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir setengah jumlah penduduk Indonesia masih terhimpit kemiskinan. Keterlibatan



Pimpinan DPR RI mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012

negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya, menjadi mutlak dilakukan.

Memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat, sebenarnya merupakan kewajiban setiap negara. Negara, wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pembahasan RUU BPJS merupakan keinginan dan keseriusan DPR dengan seluruh fraksi, untuk memberikan jaminan sosial, dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan hari tua dan pensiun didalam UU yang akan segera diselesaikan.

Dalam masalah pengawasan, selama tahun sidang ini, banyak hal yang mendapat perhatian dewan seperti masalah penegakan hukum. Dewan prihatin atas masih maraknya tindak pidana korupsi yang belum berhasil ditangani secara tuntas. Korupsi telah merugikan keuangan negara dan menjadi hambatan bagi upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewan senantiasa berharap agar lembaga penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-ba-

iknya. Dewan juga berharap, pemberantasan korupsi tidak hanya terfokus pada peran Lembaga Penegak Hukum, tetapi juga dicari solusi yang lebih cerdas yang dapat mengurangi ruang bagi Penyelenggara Negara untuk melakukan korupsi.

Masalah mafia Pemilu juga menjadi perhatian Dewan. Panja Mafia Pemilu telah bekerja efektif mengungkap terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu. Panja ini masih terus bekerja dan melanjutkan tugas dalam masa sidang ini, agar ke depan Pemilu dapat dilaksanakan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Pemilukada di Papua Barat yang rusuh dan menelan korban jiwa, menjadi keprihatinan Dewan. DPR-RI meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, hendaknya tidak dikotori dengan aksi mobilisasi rakyat dan tindakan anarki, sehingga menghancurkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Para kandidat Kepala Daerah tidak boleh membenturkan rakyatnya, hanya untuk kepentingan kekuasaan belaka. Isu politik di Papua yang terakumulasi disuarakannya referendum, memerlukan dialog antara masyarakat Papua dan Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penyelesaian melalui cara-cara pembinaan yang intensif antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan pembinaan masyarakat Papua dan Papua Barat secara menyeluruh. Dialog dilakukan dalam rambu-rambu dasar NKRI. Dalam pembinaan, aspek utama yang harus diperhatikan adalah aspek kesejahteraan, keadilan dan penegakan hukum, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin terbangun.

Dalam Pidato Presiden-RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dan Nota Keuangannya beserta Dokumen Pendukung, Presiden memulai dengan memberikan respon positif atas Pidato ketua DPR yang

memberikan dukungan, kritik dan sekaligus saran dalam mengelola negara, melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, presiden mengatakan bahwa ditengah perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan tumbuh 6,5%. Pertumbuhan ekonomi tahun ini yang merupakan pertumbuhan tertinggi setelah krisis 1998 didukung oleh infestasi, ekspor dan konsumsi masyarakat. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 6,96%, sementara hingga bulan Juli tahun 2011 inflasi kita –secara tahunan- mencapai 4,61%. Oleh karena itu, Pemerintah akan senantiasa menempatkan harga-harga sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Disisi lain, nilai tukar rupiah terus menguat. Hingga akhir Juli 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp. 8.716 per USD, atau menguat 4,93% dibandingkan dengan posisinya pada periode yang sama tahun 2010. Disisi perdagangan internasional, neraca transaksi berjalan mengalami surplus sekitar USD 5,6 miliar pada tahun 2010 dan sekitar USD 2,3 miliar sampai dengan Juni 2011. Kondisi ini disertai dengan terjadinya surplus neraca modal, seiring dengan meningkatnya arus modal masuk ke negara kita.

Saat ini, Indonesia tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Presiden mengatakan, kita patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Upaya mempercepat dan perluasan pembangunan ekonomi dituangkan didalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Ekonomi.

Dalam RAPBN tahun 2012, direncanakan tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus ditingkatkan, bahkan melampauai amanat konstitusi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kementerian dan lembaga, sekaligus meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan negara, dalam tahun 2012 akan diterapkan secara penuh penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka panjang. Untuk meningkatkan efektifitas dan efiseinsi pelaksanaan anggaran, mulai tahun ini akan diterapkan kebijakan pemberian penghargaan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, Pemerintah akan membangun sistem evaluasi kinerja penganggaran.*



Suasana Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2011

Komisi IV DPR Datangi Pasar Tradisional JABAR

Rombongan Komisi IV DPR RI mendatangi beberapa pasar tradisional di Jawa Barat (Jabar) untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah, Rabu (24/8)

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron Rabu mengatakan pihaknya mendatangi beberapa pasar tradisional sebagai upaya meyakinkan masyarakat mengenai ketersediaan sejumlah bahan pokok dan pangan menjelang lebaran.

Selain itu, kata dia, juga untuk memantau stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok dan pangan di pasaran.

“Stok beras di Jabar cukup aman hingga empat bulan ke depan, sesuai dengan hasil kunjungan ke beberapa pasar. Harga beras juga umumnya turun antara Rp200-300 per kilogram,” kata Herman.

Dikatakannya, harga beras di pasaran masih cenderung stabil. Karena itu belum perlu dilakukan operasi pasar beras murah untuk mengatasi kenaikan harga beras di pasaran.

Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok dan pangan menjelang Lebaran. Sebab dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga daging menyusul semakin dekatnya Lebaran.

Selain mendatangi pasar Induk Besar Johar Karawang, rombongan Komisi IV DPR RI itu juga mendatangi Pasar Cibitung, gudang bulog DKI Jakarta, serta mendatangi Rumah Potong Hewan dan pasar ternak, pasar tradisional dan pasar modern di Bandung.

Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurachadiana mengatakan hingga kini Karawang masih tetap memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Karena Karawang merupakan salah satu daerah lumbung padi nasional.

Sebagai daerah sentra pemasok beras, kata dia Karawang mampu memproduksi padi sebesar 1,3 juta ton per tahun. Tetapi Cellica tidak bisa menjamin beras yang beredar di pasaran sekitar Karawang merupakan produk lokal. (nt)

DPR Pertanyakan Antrean Truk Di Merak

Komisi V DPR RI yang datang ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Senin, mempertanyakan antrean truk yang sering terjadi di pelabuhan itu, hingga di dalam tol.



Anggota DPR RI mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012

“Ini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa di saat menjelang Lebaran kapal yang beroperasi bisa mencapai 40 unit, tetapi sebelumnya hanya 28 kapal saja,” kata ketua rombongan Komisi V DPR RI Nursyrwan Soedjono, saat melakukan pertemuan dengan PT ASDP Indonesia Ferry di ruang rapat VIP ASDP Cabang Utama Merak.

Menurut Nursyrwan Soedjono, semestinya pihak ASDP Indonesia Ferry mempertahankan jumlah kapal yang beroperasi, sehingga tidak terjadi antrean yang cukup panjang dan lama di luar Pelabuhan Merak.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi V lainnya, Hikmat Tomet. Menurut dia, semestinya pihak ASDP melakukan upaya evaluasi atas antrean kendaraan yang terjadi.

“Kami berharap ada evaluasi, dan

Kehadiran DPD Cermin Spirit Politik Kenegaraan

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwa Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I kali ini berbeda karena dihadiri oleh seluruh Anggota DPD RI.

“Kehadiran DPD dalam agenda Sidang Paripurna siang hari ini mencerminkan spirit politik kenegaraan didalam rangkaian kegiatan sidang bersama, yang dilaksanakan mulai tahun lalu, dan dalam rangka fungsi DPD RI untuk memberikan pertimbangan/pembahasan RAPBN sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 154” kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, (16/8)

Ia menambahkan, DPD RI tidak hanya hadir saat pembukaan masa sidang saja, tapi juga saat pidato Presiden dalam rangka pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2012 dan Nota Keuangan serta dokumen pendukung. (nt) foto:as/parle



Suasana Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2011

Ketua DPR Hadiri Malam Munajat Lailatul Qadar Masyarakat Sambas, Kalbar

Mesjid Agung Jami Sultan Muhammad Shafiuddin II, salah satu bangunan bersejarah di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dipenuhi warga masyarakat mengikuti Malam Munajat Lailatul Qadar, Sabtu (20/8/2011).

“ Kita bermunajat pada 10 malam terakhir Ramadhan sekaligus menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang diperkirakan datang pada malam-malam ganjil. Semua pasti berharap mendapatkannya karena bernilai lebih baik dari seribu bulan,” kata Ketua DPR RI Marzuki Ali mengawali pidatonya.

Akan tetapi ia berharap jamaah yang hadir pada malam itu bukan hanya fokus pada 10 hari terakhir tetapi sudah mampu menjaga kualitas ibadahnya sejak awal Ramadhan. Rahmat, maghfirah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar menurutnya hanya diperoleh hambaNYA yang konsisten berubah.

Ketua DPR juga memberikan apresiasi kepada tekad pemerintah daerah yang ingin menjadikan Sambas sebagai Bumi Serambi Mekah. Namun ia berpesan agar program yang diiringi upaya melahirkan seribu dai itu dipersiapkan dengan baik. Program pendidikan yang tersebar di beberapa pesantren agar memberikan bekal yang seimbang.

“Calon da'i jangan hanya diberikan pendidikan agama sedangkan pelajaran menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi serta kewirausahaan dilupakan,” imbuhnya. Banyak kasus para dai setelah menyelesaikan pendidikan di Ponpes tidak bisa mensejahterakan diri sendiri apalagi kalau ditambah beban mensejahterakan orang lain.

Sebagian bahkan tidak dapat mengajar mengaji, bukan karena tidak mampu tapi karena sebagian besar masyarakat berpandangan belajar ngaji itu gratis, tidak perlu bayar mahal. Orang tua lebih rela membayar dengan harga tinggi kursus bahasa Inggris. “Apabila kondisi ini tidak diperhatikan program itu bisa terjebak menjadi pusat kemiskinan baru,” kata Marzuki mengingatkan. Para da'i perlu diberikan pengetahuan kewirausahaan, supaya jangan sampai berdakwah meng-

harapkan amplop. Sehingga martabat para pendakwah ini bisa betul-betul terangkat, tidak terangkat karena amplop.

Lebih jauh Ketua DPR menambahkan ia siap memperjuangkan program yang sedang dikembangkan pemerintah di daerah asalkan mampu menjaga komitmen dan tidak korupsi. Baginya optimalisasi potensi daerah yang paling utama adalah menggunakan potensi itu dengan cerdas dan menguntungkan masyarakat. Ini dapat dimulai dengan tidak mempersulit investor yang ingin masuk.

Ia juga memberikan contoh kegagalan pemerintah di daerah lain ketika membangun tidak mengedepankan kepentingan rakyat. “Ada bupati yang mengoleksi puluhan mobil atau di daerah lain menjual seluruh konsesi pertambangan kepada swasta tidak adayang disisakan untuk daerah, semuanya berujung kegagalan, rakyatnya berteriak” katanya.

Sesuatu itu akan berakhir pada saatnya kalau Allah SWT menghendaki, jadi para pemimpin tidak perlu khawatir dijatuhkan asalkan bekerja mengedepankan rakyat. “Makanya su-

ara saya terkadang berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak apasepanjang itu untuk kepentingan rakyat, soal citra tidak ada urusan. Nilai kita akanditulis Allah, bukan manusia,” demikian Marzuki.

Dalam kesempatan itu Ketua DPR berkesempatan melihat mesjid bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shafiuddin II tahun 1885. Masjid yang berada di selatan alun-alun kesultanan ini seluruh bangunannya terbuat dari kayu, terdiri dari dua tingkat disangga delapan tiang dari kayu belian berukuran besar.

Ketua DPR didampingi Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi juga melihat bangun kesultanan serta monumen tiang kapal. Dua tiang penyangga pada sisi kiri dan kanan tiang melambangkan dalam menjalankan roda pemerintahannya Sultan selaludidampingi oleh Ulama dan Khatib. Bupati yang juga dokter perempuan ini menyebutkan disekitar area ini gugur pahlawan Sambas, Tabrani Ahmad yang ditembak penjajah Belanda saat mempertahankan merah putih. (iky) foto:ik/parle

Komisi V Terima Kunjungan Parlemen dan Dubes Jerman

Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow beserta sejumlah anggota Komisi V menerima kunjungan resmi rombongan Parlemen dan Duta Besar Jerman Nobert Baas di ruang Rapat Komisi V, Rabu Sore, (24/8).

nggiling.blogspot.com

Proyek pembangunan TPI Tanjung Adikarto Kulonprogo DIY yang masih belum selesai hingga sekarang

Kunjungan Parlemen Jerman yang didampingi Dubes Jerman untuk Indonesia tersebut bertujuan untuk bertemu langsung dengan anggota Komisi V DPR yang membidangi masalah infrastruktur.

“Terima kasih kami diberikan waktu untuk bicara dan bertemu dengan anggota DPR, saya pikir permasalahan infrastruktur adalah permasalahan kita bersama dimana semua Negara memiliki permasalahan infrastruktur, terutama masalah anggaran yang memerlukan dana yang cukup besar,” kata Dirk Fischer selaku anggota parlemen Jerman dalam menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi V mengapresiasi kedatangan Anggota Kedubes Jerman dan parlemennya.

Yasti menjelaskan, menyangkut kebijakan infrastruktur di Indonesia, kendala yang dihadapi adalah masalah pendanaan infrastruktur baik darat, laut, dan udara. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang begitu besar jumlahnya kurang lebih 17.000 pulau

yang tersebar di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan Indonesia merupakan negara maritim dan membutuhkan transportasi laut yang handal, dimana saat ini Pemerintah baru mulai membangun kurang lebih 2.600 pelabuhan. Jika dilihat dari jumlah pulau 17.000, jumlah pelabuhan yang ada masih jauh sekali.

Hal tersebut memicu pertanyaan dari salah satu anggota Parlemen Jerman yang mengatakan bagaimana cara menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, apakah menggunakan kapal feri,” tanya Uwe Karl Beckmeyer.

Terkait pertanyaan tersebut, Yasti menjelaskan bahwa memang sangat diperlukan infrastruktur laut.” Kami sudah ada beberapa pelabuhan yang dibangun dari beberapa ribu pulau yang ada di Indonesia tapi Indonesia tersangkut di masalah anggaran” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said menambahkan, untuk masalah anggaran di bidang infrastruktur ini, tentunya pemerintah Indonesia sangat membutuhkan bantuan dari Pemerin-

tah Jerman baik untuk Infrastruktur darat, laut, maupun udara. Namun, katanya, kami lebih mengarah ke infrastruktur laut karena Indonesia adalah Negara Maritim dan merupakan pertemuan empat selat yang menjadikan Indonesia pusat lalu lintas kapal-kapal.

Sementara Claudia Wintersteiny yang merupakan Panitia Anggaran Parlemen Jerman juga menanyakan berapa persentasi keseluruhan anggaran APBN yang disediakan Indonesia untuk transportasi.

Menjawab pertanyaan tersebut Yasti mengatakan bahwa saat ini Indonesia hanya menyiapkan 36,6 persen. Namun dia berharap ke depan anggaran tersebut dapat terus ditingkatkan.

Yasti juga menjelaskan bahwa sudah ada kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Indonesia dan Jerman menyangkut perkeretaapian di Indonesia. “Kami selaku anggota DPR menyambut baik dan itu adalah satu solusi pemerintah untuk bisa meringankan beban negara dalam hal transportasi nasional,” jelasnya. (lys,ie,tt)

DPR Minta Pemerintah Pastikan Stok Sembako Aman

Komisi VI DPR RI meminta pemerintah memastikan stok dan harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah dalam kondisi aman dan stabil.



Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III DPR saat menerima Kuasa Hukum Nazaruddin OC Kaligis

Demikian dikatakan Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto bersama sejumlah anggota Komisi VI DPR saat melakukan Sidak ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (22/8).

Sidak menjelang Lebaran ini dilakukan untuk memantau stok dan perkembangan harga sembako di pasaran. Selain ke Pasar Kramat Jati, sejumlah anggota Komisi VI lainnya juga melakukan Sidak ke Pasar Modern Bumi Serpong Damai City, Tangerang Banten.

Airlangga mengatakan, harga sembako di pasar tradisional di Jakarta saat ini memang relatif stabil, namun harganya masih tinggi. Untuk itu, katanya, dari produksi di tingkat petani dan distribusi ke pasar induk harus berjalan lancar.

Menurut dia, dari pantauan pasokan serta harga beras dan sayur mayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, diperkirakan hingga H-8 menjelang

Idul Fitri 1432 Hijriah masih relatif cukup dan stabil. Stabilitas bisa terjaga karena panen di tingkat petani dan distribusi ke pasar induk berjalan lancar. Namun kondisi ini harus dijaga karena lonjakan harga biasanya terjadi pada H-3 hingga H-1 Lebaran.

“Kalau ada kenaikan harga pada H-3 hingga H-1 Lebaran, ini dikarenakan dijadikan peluang bagi para pedagang untuk meraih keuntungan lebih yang memang terjadi setahun sekali. Jadi, jika ada kenaikan harga, saya pikir tidak signifikan, namun pemerintah tetap harus melakukan pengawasan,” ujarnya.

Maraknya Buah Impor

Sementara itu, saat melakukan peninjauan ke pasar, Komisi VI DPR juga menemukan banyaknya buah dan sayuran impor di Pasar Induk Kramat Jati. Buah-buahan dan sayuran yang

banyak di pasaran diantaranya adalah, jahe, wortel, kentang, bawang, jeruk, anggur dan pisang impor.

Bahkan Komisi VI DPR juga menemukannya ada jeruk yang diimpor dari Uruguay, Amerika Selatan. Sayuran impor seperti kentang impor harganya Rp 5.500 per kg, sedangkan kentang lokal Rp 7.000 per kg. Begitu juga jahe impor Rp11.000 per kg dan jahe lokal Rp 12.000 per kg serta wortel impor Rp 4.000 per kg dan wortel lokal Rp 5.000 per kg.

“Buah dan sayuran impor itu jika dijual di pasar modern tidak jadi masalah, tetapi kalau dijual di pasar tradisional, maka akan mempersulit petani dan pedagang sayur atau buah skala kecil,” katanya.

Menurut Airlangga, produk impor yang masuk ke pasar Indonesia sulit dicegah karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menekan laju inflasi. Namun, untuk produk buah dan sayur banyak diproduksi petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Jadi, semestinya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bisa membuat aturan yang lebih baik.

“Kementerian Pertanian hendaknya tidak hanya mengatur hasil produksi pertanian, tetapi juga distribusinya. Ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan,” katanya.

Menurut dia, harga buah dan sayur impor lebih murah daripada buah dan sayur lokal. Ini kemungkinan karena harga di tingkat petani lokal sudah tinggi dan biaya distribusi juga tinggi. Buah dan sayuran impor yang banyak ditemukan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, sendiri banyak berasal dari China dan Thailand. (Tim Parle)

Kemandirian Pangan Diabaikan oleh Pemerintah

DPR RI menilai anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang disampaikan Pemerintah pada RAPBN 2012 sebesar 15,6 triliun rupiah harus lebih diarahkan pada perbaikan infrastuktur energi.



Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefky Harsa ketika memberikan pernyataan kepada wartawan

Hal itu diperlukan untuk mendukung upaya bangsa untuk mencapai kemandirian di bidang energi.

“Kita berharap pemerintah bersama DPR dapat lebih memperhatikan infrastruktur energi sehingga masalah benang kusut disektor energi ini bisa diselesaikan,” jelas Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsa kepada wartawan usai menghadiri acara buka puasa bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Ia memberi contoh keterbatasan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) komoditas tambang seperti batu bara membuat prosesnya terpaksa dilakukan di luarnegeri. Penyulingan minyak mentah juga belum sepenuhnya dilakukan di dalam negeri yang tentunya akan mengurangi perolehan devisa negara.

Masalah infrastruktur gas, selama ini ada kebijakan peralatan konverter disediakan gratis, tetapi keberadaan SPBG masih terbatas. Dengan perkiraan biaya untuk pembangunan

satu SPBG sekitar 20 – 30 miliar rupiah kita harapkan pemerintah dapat merealisasikan pembangunan lebih banyak SPBG di beberapa daerah di Indonesia. “Ini memang tergantung keberpihakan pada politik anggaran di sektor energi,” tambahnya.

Pada bagian lain Teuku Riefky menyambut baik pernyataan Presiden dalam keterangan pemerintah atas RUU APBN 2012 beserta Nota Keuangannya yang akan melakukan upaya peningkatan lifting minyak dan efisiensi cost recovery. Ia meminta pemerintah yang didukung APBN lebih pro aktif melakukan eksplorasi wilayah tambang, karena sulit diharapkan pada sektor swasta yang cenderung memilih wilayah kerja yang ekonomis. Baginya upaya itulah yang dapat mendorong target lifting minyak pemerintah.

Komisi VII dalam pertemuan dengan pemerintah telah sepakat target realistis lifting minyak untuk saat ini sekitar 950 ribu barel perhari. “Target lifting ini bisa realistis atau angka

politis, nah kalau angka realistis yang kita lihat sekitar 950 ribu barel perhari-walaupun kita sebetulnya bisa mengharapkan lebih tinggi lagi. Tapi kita mencoba berpikir rasional angka yang bisa dicapai sehingga apabila meleset tidak terlalu jauh karena itu akan merusak proyeksi APBN,” imbuhnya.

BBM Menjelang Lebaran

Komisi VII meminta pemerintah benar-benar memperhatikan ketersediaan BBM menjelang dan pada saat liburan Lebaran nanti. Sejauh ini walaupun peningkatan kuota sudah disetujui parlemen ternyata laporan kelangkaan masih berlangsung di beberapa daerah di tanah air.

“Kita mengharapkan peran dari Dirjen Migas kemudian dari Pertamina dan penegak hukum terutama kepolisian dan BPH Mmigas tentunya agar kelangkaan BBM ini benar-benar harus dijaga karena kita tahu para spekulan terus bermain, ini mengakibatkan kenaikan bahan pokok dan beban bagi masyarakat,” tandas politisi Partai Demokrat ini.

DPR beberapa waktu lalu menyetujui penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2011 sebesar 1,9 juta kiloliter dari sebelumnya 38,59 juta kiloliter menjadi 40,49 juta kiloliter.

Rinciannya terdiri dari premium 24,54 juta kiloliter atau naik 8,18 persen. Solar subsidi juga naik 5,82 persen menjadi 14,15 juta kiloliter.

Teuku Riefky meminta pengawasan dari pemerintah, khususnya dalam mengendalikan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Komisi VIII lanjutnya saat ini masih menunggu pembahasan mekanisme pengaturan BBM bersubsidi bersama pemerintah yang diperkirakan tuntas tahun depan. (iky/iw)/foto:iw/parle.

Ketua DPR Tinjau Persiapan Sidang Bersama

Perhatian penuh diberikan Ketua DPR Marzuki Alie pada kegiatan gladi bersih acara Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2011).



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat meninjau persiapan Sidang Bersama di Gedung Nusantara DPR

la terlihat mencermati latihan yang dilaksanakan para petugas acara dari awal sampai akhir.

Sidang Bersama yang berlangsung setiap tanggal 16 Agustus ini diatur dalam UU nomor 27 tahun 2009 tentang MD 3 dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan itu dilaksanakan pula gladi bersih acara Pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang 2011-2012 dengan agenda mendengar Pidato Ketua DPRRI dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2012.

Marzuki Alie, didampingi Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh serta Wakil Sekjen DPDDjamhur Hidayat juga

memeriksa beberapa perlengkapan yang akan digunakan dalam dua acara yang akan dihadiri oleh Ketua Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Duta Besar Negara Sahabat.

la juga terlihat melambai ke arah paduan suara dan orkes Gita Bahana Nusantara yang anggotanya terdiri dari perwakilan pelajar dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Adira salah seorang peserta dari Yogyakarta mengaku senang dengan kunjungan Ketua DPR RI "Ada perhatian nih," katanya. la bersama seluruh anggota tim mengakusudah berlatih sembilan lagu yang terdiri dari lagu wajib dan lagu daerah.

Agenda pertama Sidang Bersama DPR dan DPD yang juga dihadiri para teladan dari seluruh Indonesia dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. Sedangkan agenda kedua Rapat Paripurna dengan acara Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang 2011-2012 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2012 akan dimulai pukul 14.30 WIB.

Pengamanan acara kenegaraan ini sudah dilakukan sejak jauh hari oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dibantu oleh TNI dan Polri. Wartawan baik dalam dan luar negeri juga terlihat memberikan perhatian penuh. Beberapa kendaraan siaran luar stasiun televisi, perangkat mobil satelit sudah di parkir di halaman gedung. (iky) foto:ry/parle

Komisi I DPR RI

Pulau Morotai Layak Pangkalan Militer

Komisi I DPR RI menilai Pulau Morotai layak dijadikan Pangkalan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Letak Geografis yang strategis merupakan pulau terdepan dan wilayah pintu gerbang masuk Indonesia melalui Samudera Pasifik,

bertetangga dengan Asia Timur, dan berada pada jalur utama menuju Australia dan Selandia Baru.

Demikian dorongan Komisi DPR

RI bidang Pertahanan saat melakukan pertemuan dengan Pangdam XVI/Patimura, Danlanal Maluku Utara serta Danlanud Morotai, Senin (25/7), Kunjungan Kerja di Provinsi Provinsi Maluku Utara.

Anggota Komisi I Teguh Juwarno, Pulau Morotai merupakan wilayah pulau terdepan dari NKRI. Pulau Morotai pernah dipilih Amerika Serikat untuk menjadi lokasi Pangkalan militer dalam menghadapi Jepang.

Dia menilai ada konteks penentuan tempat. Selain untuk kepentingan pertempuran dengan Jepang, tentu ada pemikiran geostrategis lokasi. "Saya mendorong agar lokasi Pulau Morotai dapat dijadikan Pangkalan Militer oleh TNI," tegas Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional. (as)foto:as



Anggota Komisi I Teguh Juwarno (paling kiri)

Komisi IV DPR Tinjau Lokasi Pasca Erupsi Gunung Merapi di Kec. Cangkringan Kab. Sleman DIY

Sebanyak 23 anggota Komisi IV DPR dan rombongan meninjau langsung peta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi lereng Gunung Merapi, pasca erupsi 2010 di Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Situasi lokasi pasca erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY

Pimpinan rombongan Komisi IV DPR Romahurmuzyi mengatakan, maksud kunjungan itu untuk melihat secara langsung lokasi yang terkena bencana dan peta rencana penataan kawasan pada masa

rehabilitasi dan rekonstruksi lereng gunung Merapi pasca erupsi 2010 lalu.

"Kami sebelumnya sudah mendelegasikan pemaparan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X soal rencana rehabilitasi-rekonstruksi

lereng Merapi ini. Untuk itu kami juga perlu melihat langsung di lokasi terkait rencana selanjutnya," ucap Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuzyi.

Romahurmuzyi juga mengatakan, anggaran tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pertama yang diajukan Pemprov DIY sebesar Rp. 297 miliar. Sekretaris fraksi PPP DPR RI ini meminta agar pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan rumah permanen bagi warga korban bencana erupsi Gunung Merapi dan memberi kepastian lapangan pekerjaan bagi para korban erupsi Merapi.

"Yang terpenting bagaimana supaya ekonomi bisa berjalan lagi serta status kepemilikan tanah juga harus jelas. Mana yang nantinya menjadi hutan lindung atau hutan rakyat sehingga fungsinya menjadi jelas untuk pemberdayaan ekonomi warga," ucapnya. Romahurmuzyi menegaskan dengan demikian proses yuridis-formil rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi bisa selesai dalam waktu cepat. (Rep.Tvp) foto:parle

Puasa Meningkatkan Modal Spiritual dalam Menjalankan Tugas

Hal ini dikatakannya saat menyampaikan sambutan selaku tuan rumah acara berbuka puasa bersama Presiden, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di rumah dinas Widya Candra III/10 Jakarta Selatan, Jumat (5/8/2011).

“Sifat terpuji ini menjadi modal spiritual kita dalam menjalankan tugas baik selama Ramadhan maupun setelah Ramadhan hingga yaumul kiamah. Kita berharap bangsa Indonesia dan negara Indonesia tercinta menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbunghafur, negeri yang baik yang selalu dalam ampunan Allah,” tambahnya.

Ketua DPR yang berpidato di halaman belakang kediamannya yang ditata khusus untuk acara berbuka puasa dan shalat Magrib berjamaah, memaparkan beberapa sifat Rasulullah yang patut menjadi pelajaran dan teladan seperti kesabaran, kedisiplinan, kejujuran, keikhlasan dan ketsetiakawanan.

Kepada wartawan usai acara Mar-

Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap puasa di bulan Ramadhan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dengan meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW.

zuki Alie menambahkan acara berpuka puasa bersama pejabat negara, merupakan kesempatan untuk bersilaturahmi yang berlangsung setiap Ramadhan. Presiden dan pimpinan lembaga negara menjadi tuan rumah secara bergantian dan biasanya berlangsung di kediaman dinas.

“Kita bersilaturahmi termasuk membicarakan masalah negara, kita bicara sesuai tugas kita, tetapi tidak mengintervensi tugas-tugas yang lain, yang jelas kita mempunyai pemikiran, pemahaman, dalam rangka membawa bangsa kita kearah yang lebih baik,” imbuh politisi dari Partai Demokrat ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam acara tersebut didampingi Ibu Negara Ani Bambang Yudhono. Demikian pula Wakil Presiden didampingi istrinya Herawati Boediono. Presiden yang mengenakan baju koko berwarna biru pada kesem-

patan itu tidak menyampaikan sambutan. Pada bagian akhir acara ia sempat menyampaikan salam kepada para wartawan yang berdiri di pintu keluar. “Assalamualaikum,” katanya sambil melambaikan tangan.

Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam menyambut para tamu didampingi istrinya Asmawati Marzuki Alie. Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Taufik Kurniawan, serta beberapa pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Dari jajaran pimpinan lembaga negara terlihat diantaranya, Ketua MPR RI Taufik Kiemas, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua BPK RI Hadi Poernomo, serta Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Sementara menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menlu Marty Natalegawa, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Mendiknas Muhammad Nuh. (iky) foto:as/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan sambutan buka bersama bersama Presiden, Pimpinan Lembaga dan Menteri Kabinet Bersatu II

Kini saatnya momentum terbaik membersihkan Indonesia dari korupsi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa saat inilah momentum terbaik untuk terus membersihkan Indonesia dari korupsi karena Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus membaik.



Pidato Presiden di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-66

Transparency International memberikan skor IPK 2,0 pada 2004 membaik menjadi 2,8 pada 2010, merupakan yang tertinggi di antara seluruh negara ASEAN”, kata Presiden dihadapan sidang Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi kemerdekaan Republik

Indonesia, Selasa 16/8/11.

Presiden juga menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan. Untuk itu, upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dicegah sekuat tenaga. Termasuk mengawal proses seleksi Pimpinan KPK.

Untuk itu mekanisme kerja di internal KPK sendiri perlu terus disempurnakan, sehingga tetap steril dari korupsi. Selain itu, regulasi antikorupsi harus terus disempurnakan. Lembaga-lembaga antikorupsi selain KPK seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), harus terus diperkuat dan didukung efektivitas kerjanya.

“Namun kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan indeks korupsi secara berarti di masa mendatang,” kata Presiden. Bukan hanya itu dalam pidato presiden juga mengatakan “Pada saat yang sama, kita mendorong dan mendukung agar jajaran Kejaksaan dan Kepolisian RI terus berbenah diri dan melanjutkan reformasi. Kedua lembaga penegak hukum itu harus menjadi lembaga yang semakin berintegritas dan kredibel di depan publik,” jelasnya. (tim-par) foto: ry/parle



DPR Prihatin Kasus Korupsi Tidak Tertangani Tuntas

Ketua DPR Mazuki Alie dalam pidatonya mengatakan, DPR prihatin atas maraknya tindak pidana korupsi yang belum berhasil ditangani secara tuntas.

“Korupsi telah merugikan keuangan negara dan menjadi hambatan bagi upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu dewan berharap agar lembaga penegak hukum dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya,” kata Marzuki dihadapan peserta rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (16/8)

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam kaitan ini, DPR sedang menunggu usulan dari Presiden untuk menyampaikan nama-nama calon pimpinan KPK, yang selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan mekanisme dan prosedur.

“Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan ini diharapkan menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel, kapabel, jujur, berani, dan ikhlas bekerja untuk bangsa dan negara,” kata Marzuki.

Ia menambahkan, DPR juga berharap, pemberantasan korupsi tidak hanya terfokus pada peran lembaga penegak hukum, tetapi juga dicari solu-

si yang lebih cerdas, yang dapat mengurangi ruang bagi penyelenggaraan negara untuk melakukan korupsi. (nt) foto:ry/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2011 - 2012

DPR Bertekad Menyelesaikan RUU BPJS Secepatnya

DPR memiliki tanggungjawab kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam mendorong lahirnya kebijakan yang menyangkut pemberian jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

“Untuk alasan itulah DPR menyampaikan tekad mendukung penyelesaian secepatnya RUU BPJS, mengingat dampaknya yang besar dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi rakyat yang hidup jauh dari sejahtera dan rawan dari ancaman penyakit,” demikian Marzuki Ali, Ketua DPR RI saat menyampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/8)

Marzuki menjelaskan bahwa pembahasan RUU BPJS merupakan keinginan dan keseriusan DPR dengan seluruh fraksi, untuk memberikan jaminan sosial, dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan hari tua dan pension didalam UU yang akan segera akan diselesaikan. (sc) foto:ry/parle



Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2011

Penyelenggaraan OTDA Cukup Banyak Kemajuan

Ketua DPR Marzuki Alie di hadapan peserta Rapat Paripurna DPR, Rabu (16/8) mengatakan penyelenggaraan Otonomi Daerah (OTDA) melalui kebijakan desentralisasi sebagai konsensus politik nasional cukup banyak kemajuan, namun masih banyak juga persoalan yang ditemukan.



Pimpinan DPR RI mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012

“Persoalan yang muncul, utamanya berkaitan dengan masalah hubungan pusat dan daerah, terkait dalam hal fiskal dan anggaran,” ujar Marzuki.

Selain itu, tambahnya, pelaksanaan

Otda juga masih terkendala pada penataan daerah atau penataan manajemen unit Pemerintahan Daerah, misalnya pemekarandaerah, wilayah perbatasan, penataan ruang wilayah, serta hal tata kehidupan masyarakat.

“Keberhasilan Otda, sangat tergantung kepada kepemimpinan di daerah, disamping koherensi politik, lanjutnya, faktor kualitas kepemimpinan eksekutif daerah menjadi faktor penting,” tegasnya.

Dalam kaitan ini, lanjutnya, dewan berpendapat, bahwa sudah waktunya DPR dan pemerintah membahas RUU Pemilukada, agar proses demokrasi di daerah dapat berjalan baik dan menghasilkan kepala daerah yang kompeten. (nt) foto:iw/parle



Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012

Kecerdasan Yang Merusak

Salah satu permasalahan terbesar bangsa ini adalah terjadinya krisis moral, krisis spiritual, maupun krisis sosial yang melanda masyarakat kita. Tidak dapat dipungkiri, bahwa moral, akhlak dan etika berbangsa dirasakan makin turun, yang membawa pengaruh terhadap tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Oleh: DR. H. Marzuki Alie

Para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, yang seharusnya berperan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menumbuhkan rasa keadilan masyarakat, justru banyak terseret dalam persoalan korupsi. Persoalan ini semakin sulit terselesaikan karena dalam praktek pada umumnya, korupsi dilakukan secara bersama-sama (berjamaah). Praktek korupsi bahkan juga melibatkan sejumlah aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Tidak kalah menyedihkan, dunia pendidikan yang dianggap sebagai kunci untuk mencerdaskan anak bangsa, baik secara intelektual, spiritual maupun sosial, pada kenyataannya justru ikut dilanda krisis. Kasus plagiarisme di sejumlah perguruan tinggi, kasus joki pada saat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, serta kasus contek massal di beberapa daerah pada saat Ujian Nasional merupakan fakta mengerikan, yang tidak bisa dihilangkan dalam ingatan masyarakat.

Beberapa kasus diatas merupakan gambaran mengenai kehidupan bangsa kita yang miskin moral dan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Perilaku korupsi sebenarnya adalah salah satu



bentuk pengingkaran terhadap aturan dan merupakan perilaku yang tidak didasari oleh nilai-nilai kejujuran dan moral. Perilaku korupsi yang marak di masyarakat kita, sesungguhnya adalah perilaku yang membutuhkan “kecerdasan tersendiri”, yaitu kecerdasan untuk bertindak tidak jujur atau berbohong. Dengan demikian, korupsi yang banyak terjadi saat ini, sesungguhnya banyak dilakukan oleh orang-orang yang terdidik dan memiliki kecerdasan intelektual disatu sisi, namun karena rendahnya nilai-nilai spiritual yang dimilikinya, membawa perilaku orang-orang tersebut mengarah pada perilaku koruptif dan merusak.

Jika kita menilai kondisi masyarakat saat ini, tentu tidak lepas dari pendidikan yang berlangsung pada masa lalu. Singkatnya, perikulu korupsi yang terjadi saat ini adalah produk dari pendidikan masa lalu yang salah. Pendidikan yang hanya berbasis pada pengembangan intelektual tanpa pengembangan nilai-nilai spiritual dan sosial, merupakan metode pendidikan yang **perlu dikoreksi**. Sebab, intelektual tinggi tanpa diimbangi dengan nilai-nilai spiritual dan sosial, tidak akan menghasilkan kecerdasan utuh. Banyak orang terlalu mendambakan

materi, menjadikan mereka egois, sehingga tidak lagi peduli pada komitmen dan seringkali kehilangan makna atas apa yang mereka kerjakan, dan bahkan kehilangan rasa solidaritas untuk masyarakat sekitarnya sekalipun.

Secara harfiah, jika seseorang memiliki intelegensi yang tinggi, tentu akan berfikir bagaimana bisa memanfaatkannya. Intelektualitas, selalu berbicara mengenai kemampuan individu untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialaminya, dengan begitu, mereka bisa mengatasi setiap kesulitan hidup yang dirasakan. Namun, **kecerdasan intelektual** seyogyanya harus diimbangi dengan **kecerdasan spiritual** dan **kecerdasan sosial**. Kecerdasan spiritual merupakan landasan yang memfungsikan intelegensi dan emosi secara efektif. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan makna, motivasi, etika dan tujuan hidup setiap individu. Kecerdasan spiritual menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Dari sinilah akan lahir kecerdasan sosial, yaitu kecerdasan seseorang yang mengagungkan kebersamaan

dan mampu memaknai hidup dengan sebaik-baiknya.

Jika ketiga kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, spiritual serta sosial, ada dalam diri setiap manusia, maka perilaku selama hidupnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat maupun Tuhannya.

Menurut saya, pengembangan kecerdasan yang dibina melalui pendidikan, baik formal maupun informal, seharusnya bukan semata-mata pada aktifitas otak yang kemudian dievaluasi secara kuantitatif, melainkan perlu memasukkan dimensi batin dan evaluasi kualitatif. Kecerdasan tanpa komitmen moral akan membuat manusia selalu menghindar dari ketentuan hukum sepanjang tidak menguntungkan untuk dirinya pribadi. Itulah yang menjadi penyebab munculnya kecerdasan

yang merusak. Itu pula yang menyebabkan modus kejahatan, seperti kolusi, manipulasi, korupsi dan perekrasan berbagai kasus bisa terjadi.

Peran dunia pendidikan seharusnya bisa menjadi benteng, dimana kecerdasan intelektual, spiritual dan sosial, dibentuk. Namun, jika dalam dunia pendidikan pun masih kita dapatkan berbagai kecurangan dan perilaku seperti diatas, walhasil produk sumberdaya manusia yang akan datang, tidak lebih baik daripada saat ini. Jumlah masyarakat terdidik yang makin bertambah tidak berbanding lurus dengan jumlah masyarakat yang bermoral. Pendidikan tidak mampu menghasilkan masyarakat terdidik sekaligus bermoral dan memiliki kecerdasan sosial yang diharapkan. Dengan demikian, akhirnya kita hanya akan melihat

makin banyaknya perilaku koruptif di masyarakat.

Solusi dari persoalan besar bangsa ini, tetap tidak lepas dari pendidikan yang kita kembangkan. Evaluasi terhadap dunia pendidikan saat ini diharapkan bisa memperbaiki sumberdaya manusia di masa depan. Sementara, untuk perilaku korupsi yang banyak terjadi pada saat ini, tidak lain kecuali dibutuhkan komitmen bersama untuk memperbaiki akhlak dan moral bangsa. Bangsa ini harus berkomitmen untuk menggunakan kecerdasannya untuk tujuan yang positif dan konstruktif, bukan untuk tujuan-tujuan yang merusak. Ini merupakan komitmen yang tidak mudah. Namun, hanya dengan komitmen inilah, berbagai permasalahan bangsa diharapkan bisa terurai. Wallahu'alam bissawab.*

Pemerintah diminta konsisten melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi

DPR meminta pemerintah konsisten melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tahun 2012 melalui penyaluran tertutup dan bertahap sesuai target sasaran serta penyempurnaan regulasi.

Demikian di sampaikan oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie didepan sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang 2011-2012, di gedung dprjakarta/Selasa16-8-11.

Lebih lanjut Marzuki mengemukakan dalam hal pengendalian ini pemerintah dapat melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg serta meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan lebih ketat volume BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pengaturan tata niaga BBM, tambah Marzuki. Hal yang lebih adalah penindakan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi karena hingga kini belum ada langkah konkret yang dilakukan.

Sementara itu menanggapi kebijakan subsidi PLN tahun 2012, Wakil Ketua Pembina Partai Demokrat ini mengatakan bahwa adanya kesepakatan agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan berke-

senambungan antara kepentingan penyediaan listrik (PLN) dan konsumen. Pemberian subsidi listrik kepada golongan pelanggan yang lebih tepat sasaran dengan didukung kebijakna tarif serta optimilasi bauran energi (en-

ergy mix) untuk bahan bakar terutama dengan cara menurunkan penggunaan BBM serta menjamin dan menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, batubara dan jenis energi lainnya, ungkap Marzuki Alie. (LSS) foto:as/parle



Pimpinan DPR RI mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012

DPR RI Mendukung Kemerdekaan Kosovo

Kemerdekaan yang di deklarasikan secara unilateral oleh Kosovo pada 17 Februari 2008 hingga hari ini baru mendapatkan pengakuan dari 77 negara.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kiri) saat menerima kunjungan Delegasi Negara Kosovo

Ironisnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia masih belum memberikan pengakuan kepada negara yang memiliki 90% penduduknya beragama Islam tersebut.

Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik, luar negeri, hukum dan keamanan, Priyo Budi Santoso menyayangkan sikap politik yang diambil oleh pemerintah tersebut. “Pada titik tertentu, DPR RI dapat memahami posisi pemerintah yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo karena alasan isu separatisme. Namun, harus dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat Kosovo bukanlah suatu bentuk separatisme melainkan upaya meraih kemerdekaan. Kosovo secara budaya dan sejarah juga tidak pernah menjadi bagian dari Serbia.” ungkap Priyo.

Untuk itu, Priyo dalam waktu dekat akan menggalang dukungan DPR RI agar segera mendesak pemerintah untuk segera memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Kosovo. Priyo juga berjanji akan segera berkomunikasi



Keindahan Kosovo

dengan Menlu Marty Natalegawa untuk membahas masalah ini. Hal ini disampaikan Priyo dalam pertemuannya dengan Dr. Rexhep Bajgo, perwakilan Presiden Kosovo sekaligus mantan Mufti Besar Kosovo. Pertemuan ini difasilitasi oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin di Gedung DPR RI, Rabu, 10 Agustus 2011.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional di Den Haag juga telah memberikan Advisory Opinion yang tidak memperlakukan kemerdekaan

Kosovo. “Saya masih ingat bahwa pada medio 2010 lalu, Mahkamah Internasional di dalam Advisory Opinion No.141 berkesimpulan bahwa kemerdekaan Kosovo tidak melanggar kaidah-kaidah hukum internasional. Jadi, apa alasan Pemerintah kita untuk tidak memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo? Bukankah dukungan terhadap sebuah kemerdekaan telah secara jelas dijamin oleh Pembukaan UUD 1945?.” tegasnya.

Dalam mengaktualisasi dukungan DPR RI terhadap kemerdekaan Kosovo, Priyo menyambut baik rencana peningkatan hubungan antara DPR RI dengan Parlemen Kosovo di berbagai

bidang. “Saya mendapat berita bahwa ada rencana dari beberapa Komisi dan alat kelengkapan untuk menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan Parlemen Kosovo. Selain itu, sebagai Presiden organisasi parlemen negaranegara OKI (PUIC), DPR RI berencana mengundang Parlemen Kosovo sebagai peninjau di dalam Sidang PUIC tahun 2012 di Palembang. Ini adalah bukti kongkrit dukungan DPR RI atas kemerdekaan Kosovo.” kata Priyo. (parle) foto:iw/parle



Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup dalam Ke-Bhinneka-an untuk Kokohkan Persatuan NKRI,
Kita Sukseskan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum ASEAN untuk kokohkan Solidaritas ASEAN



**Keluarga Besar
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Mengucapkan
Selamat Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-66**

**17
Agustus 2011**

